

## PENGARUH PARTISIPASI PENDIDIKAN TERHADAP PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

**Dini Amaliah**

Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial  
Universitas Indraprasta PGRI  
dini230612@gmail.com

*Abstract: The aim of this study was to determine how much influence of the Gross Enrolment Ratio (GER) and net enrollment ratio (NER) of the Percentage of Poor (Case Studies in Jakarta in the Year 2009-2013). The research method is using a quantitative approach. Unit analyzed were the percentage of poor people (PPM), the gross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Source of data is secondary data in the form of books, dictionaries, scientific articles, data collected and published by the Central Bureau of Statistics (BPS). Hypothesis testing concluded that there was no significant effect of GER and enrollment at the percentage of poor people in Jakarta in 2009-2013 either partially or jointly represented by the magnitude of 0.572 calculated  $F < F$  table 9.55 on the level 0.05 significant.*

*Keywords: gross enrollment ratios, enrollment at, Percentage of Poor People*

**Abstrak:** Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap Persentase Penduduk Miskin (Studi Kasus di DKI Jakarta Pada Tahun 2009-2013). Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Unit yang dianalisis adalah persentase penduduk miskin (PPM), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Sumber data adalah data sekunder berupa buku, kamus, artikel ilmiah, data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Tidak terdapat pengaruh signifikan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009-2013 baik secara parsial maupun secara bersama-sama yang ditunjukkan oleh besarnya  $F$  hitung  $0,572 <$  dari  $F$  tabel 9,55 pada taraf signifikan 0,05.

**Kata Kunci:** Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Persentase Penduduk Miskin

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

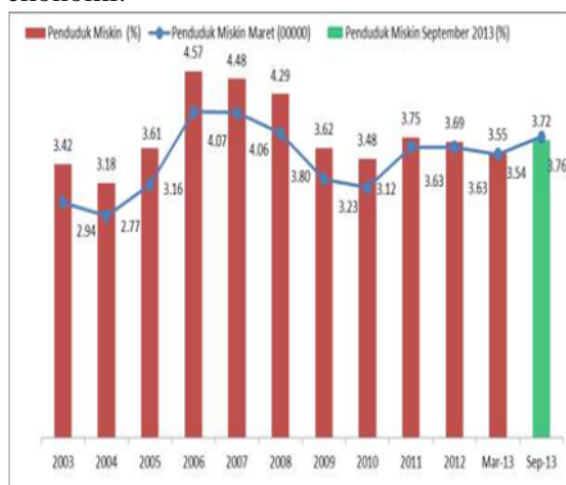
Sejalan dengan itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Programme (UNDP)

mencantumkan poin pertama dari Tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah : Memberantas kemiskinan dan kelaparan.

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin.

Sedangkan di Indonesia permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara si kaya dan si miskin. Dimana biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah bagi si kaya dan si miskin relatif sama tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktivitas dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1 : Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta, 2003-2013(Maret) dan September 2013  
 Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No.04/01/31/Th.XVI, 2 Januari 2014

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadi sorotan dan ukuran pembangunan negara Indonesia. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta menyatakan bahwa “Garis Kemiskinan (GK) bulan September 2013 sebesar Rp434.322 perkapita perbulan, lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Maret 2013 sebesar Rp 407.437

perkapita perbulan dan dari Garis Kemiskinan September 2012 sebesar Rp392.571 perkapita perbulan.” (Jurnal BPS DKI Jakarta, No.04/01/31/Th.XVI/2 Januari 2014). Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, khususnya ibukota masih memerlukan perhatian besar dalam meminimalisir angka kemiskinan.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu indikatornya adalah tingkat partisipasi pendidikan yang terdiri dari dua variabel yaitu angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka Partisipasi Murni (APM), yang mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Angka Partisipasi Kasar (APK), mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pendidikan

Dalam Bahasa Inggris Pendidikan disebut Education yang berasal dari kata educare berarti menarik keluar atau drawing out atau memunculkan potensi anak atau mengembangkan potensi anak didik. Sedangkan menurut tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008: 326) pendidikan adalah proses penebangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut tim redaksi *longman advanced american dictionary* (2007:509) pendidikan adalah proses untuk mengembangkan pikiran seseorang melalui belajar di sekolah atau perguruan tinggi.

Pendidikan memiliki peranan yang besar bagi pembangunan suatu negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 menyatakan bahwa pendidikan sebagai penyiapan warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu hak dan kewajiban.

Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab 1 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jadi pendidikan pada dasarnya merupakan indikator pengembangan sumber daya manusia yang unggul yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara. Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, PBB menuangkannya dalam 8 tujuan pembangunan milenium pada butir ke 2 yaitu mencapai pendidikan dasar universal (UN,2011).

Indeks pendidikan menjadi salah satu indeks dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk meningkatkan IPM di suatu wilayah makaharus meningkatkan Indeks Kesehatanatau Indeks Pendidikanatau Indeks Kemampuan Daya Beli. Dengan pendidikan yang semakin tinggi maka IPM sebuah daerah akan semakin tinggi pula.

## 2. Partisipasi Pendidikan

### a. Partisipasi

Konsep partisipasi memiliki banyak penekanan makna. Beberapa definisi disajikan, mulai dari penekanan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan keputusan '(Uphoff dan Cohen), 'rakyat yang memiliki kendali

terhadap sumber daya dan institusi '(Pearse dan Stifel), hingga 'kemampuan rakyat dalam memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya' (Paul) dalam JimIfe (2008: 296– 297).

Keragaman arti partisipasi terkait erat dengan kepentingan dan agenda yang beragam pula dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. (JimIfe, 2008: 296– 297).

Partisipasi masyarakat (*socialparticipation*) adalah suatu bentuk interaksi sosial terhadap suatu kegiatan. Definisi partisipasi masyarakat yang sudah diterima oleh PBB, sebagaimana dikutip dari Sugandhi (2009: 108) adalah: The creation of opportunities to enable all members of community and the larger society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development.

Berkaitan dengan sifat-sifat partisipasi masyarakat, beberapa pakar menyebutkan ada partisipasi otonom yang dilakukan atas kesadaran ataukah partisipasi yang dimobilisasi (*mobilizedparticipation*). Adanya perbedaan dua sifat tersebut bertumpu pada kerelaan atau keterpaksaan, ini sebagaimana pendapat Myron Wiener. Namun disisi lain, pendapat berbeda yang tidak melihat sifat sukarela sebagai ukuran ada tidaknya partisipasi masyarakat dikemukakan Samuel Huntington dan JoanNelson.

Meskipun demikian, kedua sifat partisipasi masyarakat tersebut memiliki konsekwensi yang tidak berbeda, yaitu mempengaruhi proses penyelenggaraan dan proses pengambilan kebijakan dalam pemerintahan. (Saifudin, 2009: 96 – 99).

Dalam konteks mendorong keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan, Ife menjelaskan tentang

kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi, yaitu sebagai berikut: partisipasi masyarakat akan muncul ketika dirasakan suatu aktivitas tersebut penting; adanya anggapan bahwa aksi partisipasi mereka akan membuat perubahan; berbagai bentuk partisipasi, apapun tingkatan dan jenisnya, harus diakui dan dihargai; orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya; dan struktur dan proses partisipasi tidak boleh mengucilkan sehingga masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol struktur dan proses tersebut. (JimIfe, 2008: 310 - 312).

Dengan demikian, proses partisipasi masyarakat akan lebih bermakna dan berkualitas ketika masyarakat memiliki kapasitas yang cukup untuk turut serta dalam proses advokasi kebijakan publik. Apa pentingnya angka partisipasi itu? Memahami angka partisipasi dalam pendidikan tentu sangat penting bagi semua pihak sebab dengan mengetahui angka partisipasi maka akan mengetahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai? Dengan angka partisipasi, dapat diketahui pada karakter atau variable apa saja, ketidak merataan atau kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan itu terjadi? Terlebih lagi pemerintah menerapkan kebijakan anggaran pendidikan 20% (APBN dan APBD). Dengan mengetahui partisipasi pendidikan akan mengetahui apakah anggaran pendidikan yang semakin besar berkorelasi positif terhadap pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan.

**b. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Indikator yang lain yang sering digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender pada bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menurut "TheUNGuidelines Indicators for

*Monitoring the Millenium Development Goals*", angka ini lebih baik daripada perbandingan jumlah *absolute* murid laki-laki dan perempuan.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. (<http://sirusa.bps.go.id>), yang digunakan untuk tujuan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

**c. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. APK dapat mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen. APM dapat menjadi lebih dari 100 persen kalau banyak siswa luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di mana siswa dari pinggiran kota atau perkotaan bersekolah ke kota karena fasilitas yang lebih memadai.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) APM adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan

tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jadi APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika  $APM = 100$ , berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

### 3. Kemiskinan

Menurut Piven dan Clowed dan Swanson dalam Suharto (2009:15) kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan perumahan. Seseorang atau sebuah keluarga dianggap miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan mereka atau akses mereka terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan orang lain dalam perekonomian. Kemiskinan juga dapat dilihat sebagai beberapa tingkat absolut pendapatan atau standar hidup, biasanya pada atau dekat dengan sekedar menyambung hidup secara minimum.

Opini publik yang patut dibenarkan adalah bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang, termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya (Wahid,2008).

Untuk mengukur kemiskinan, Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Memperkirakan angka kemiskinan, memerlukan data-data tentang ukuran

kesejahteraan dan perkiraan garis kemiskinan. Di Indonesia ukuran kesejahteraan yang digunakan adalah konsumsi perkapita. Rumah tangga dengan konsumsi perkapita di bawah garis kemiskinan digolongkan miskin (Bank Dunia, 2007: 35). Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu satu untuk komponen makanan dan satu untuk komponen bukan makanan. Kedua, komponen garis kemiskinan digunakan sebagai komponen utama untuk menghitung daftar kebutuhan dasar minimal.

Ini dilakukan untuk setiap provinsi secara terpisah, menurut daerah perkotaan maupun pedesaan untuk memberi gambaran mengenai perbedaan pola konsumsi. (Bank Dunia, 2007: 35). Menurut BPS persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan.

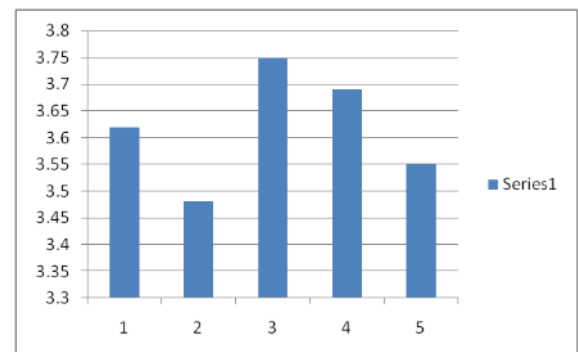
## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Unit yang dianalisis adalah persentase penduduk miskin (PPM), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Sumber data adalah data sekunder berupa buku, kamus, artikel ilmiah, data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

#### 1. Variabel Persentase Penduduk Miskin (Y)



Gambar 2

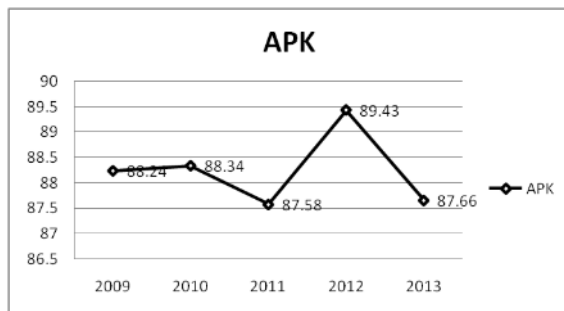
Diagram Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2009 – 2013



Dari diagram batang di atas diketahui bahwa perkembangan persentase penduduk miskin DKI Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi yang cenderung tetap.

## 2. Variabel Angka Partisipasi Kasar (X1)

Fluktuasi laju perkembangan APK di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data olahan peneliti

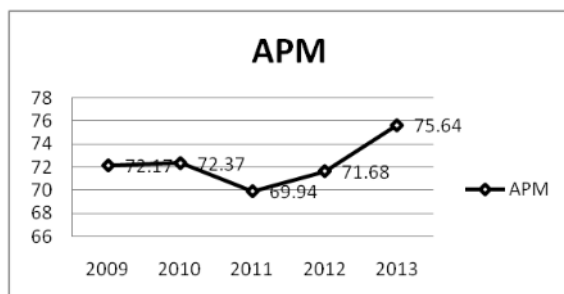
Gambar 3

Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Di DKI Jakarta tahun 2009-2013

Berdasarkan pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa APK di DKI Jakarta pada tahun 2009 sampai 2013 mengalami penurunan dengan selisih 0,58 persen walaupun pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 89,43. Penurunan yang terjadi pada tahun 2013 dikarenakan program Kartu Jakarta Pintar belum dirasakan secara merata oleh semua penduduk DKI Jakarta.

## 3. Variabel Angka Partisipasi Murni (X2)

Fluktuasi laju perkembangan APM di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data olahan peneliti

Gambar 4

Angka Partisipasi Murni (APM)  
Di DKI Jakarta tahun 2009-2013

Pada gambar 1.4 dilihat bahwa APM di DKI Jakarta tahun 2009 sampai tahun 2013 APM mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 75,64 persen di tahun 2013. Peningkatan APM di tahun 2013 dikarenakan meningkatnya proporsi jumlah anak pada kelompok usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tertentu sesuai dengan usianya dan juga kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan di DKI Jakarta.

## Pengujian Hipotesis

### 1. Pengaruh Angka Partisipasi Kasar terhadap Persentase Penduduk Miskin

Tabel 1  
Perhitungan Regresi Linier Sederhana  
Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun	X <sub>1</sub>	Y	X <sub>1</sub> <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	X <sub>1</sub> Y
2009	88,24	3,62	7786,298	13,1044	319,429
2010	88,34	3,48	7803,956	12,1104	307,423
2011	87,58	3,75	7670,256	14,0625	328,425
2012	89,43	3,69	7997,725	13,6161	329,997
2013	87,66	3,55	7684,276	12,6025	311,193
Σ	441,25	18,09	38942,51	65,4959	1596,47

Menghitung konstanta dan koefisien arah regresi

Konstanta regresi yaitu:

$$a = \frac{\sum Y \cdot \sum X^2 - \sum X \cdot \sum XY}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(18,09) \cdot (3892,51) - (441,25) \cdot (1596,47)}{(5) \cdot (38942,51) - (441,25)^2} = 2,65$$

Koefisien arah regresi yaitu

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{(5) \cdot (1596,47) - (441,25) \cdot (18,09)}{(5) \cdot (38942,51) - (441,25)^2} = 0,01$$

Persamaan regresi linier sederhana APK adalah  $Y = 2,65 + 0,01X_1$

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan maka hasil dari korelasi disajikan

$$R = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$R = 0,086$  (Rendah)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka hasil dari koefisien determinasi akan disajikan dibawah ini:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = (0,086)^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,007436 \times 100\%$$

$$KD = 0,744\%$$

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,744%. Hal ini berarti angka partisipasi kasar memberikan kontribusi sebesar 0,744% terhadap persentase penduduk miskin sedangkan sisanya 99,256% merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi persentase penduduk miskin yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui bahwa kedua variabel terdapat hubungan yang signifikan dapat dilakukan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t = 0,149$$

Untuk menguji hipotesis ini kriteria yang digunakan adalah kriteria untuk uji t dimana penetapan signifikan dengan  $df = n-k - 2 = 3$ , sig 0,05, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 3,182. Karena  $t_{hitung} 0,149 < t_{tabel} 3,182$  maka  $H_0$  ditolak  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi kasar tidak mempunyai pengaruh terhadap persentase penduduk miskin.

**2. Pengaruh Angka Partisipasi Murni terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Tabel 2  
Perhitungan Regresi Linier Sederhana  
Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun	$X_2$	Y	$X_2^2$	$Y^2$	$X_2Y$
2009	72,17	3,62	5208,509	13,1044	261,255
2010	72,37	3,48	5237,417	12,1104	251,848
2011	69,94	3,75	4891,604	14,0625	262,275
2012	71,68	3,69	5138,022	13,6161	264,499
2013	75,64	3,55	5721,410	12,6025	268,522
$\Sigma$	361,8	18,09	26196,962	65,4959	1308,4

Menghitung konstanta dan koefisien arah regresi

Konstanta regresi yaitu:

$$a = \frac{\Sigma Y \cdot \Sigma X^2 - \Sigma X \cdot \Sigma XY}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$a = \frac{(18,09) \cdot (26196,96) - (361,8) \cdot (1308,4)}{(5) \cdot (26196,96) - (361,8)^2} = 6,13$$

Koefisien arah regresi yaitu

$$b = \frac{n \Sigma XY - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{(5) \cdot (1308,4) - (361,8) \cdot (18,09)}{(5) \cdot (26196,96) - (361,8)^2} = -0,035$$

Persamaan regresi linier sederhana APM adalah  $Y = 6,13 - 0,035X_2$

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, maka hasil dari korelasi

$$R = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{N \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\} \{N \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

$$R = -0,666 \text{ (Sangat rendah)}$$

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka hasil dari koefisien determinasi akan disajikan dibawah ini:

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

$$KD = -0,666^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,443 \times 100\%$$

$$KD = 44,31 \%$$

Dari hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi yang diperoleh 44,31%. Hal ini berarti angka partisipasi murni memberikan kontribusi terhadap persentase penduduk miskin sebesar 44,31% sedangkan sisanya 55,69% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi persentase penduduk miskin yang tidak diteliti pada penelitian ini. Untuk membuktikan bahwa kedua variabel terdapat hubungan yang signifikan dapat dilakukan dengan uji t dengan rumus sebagai

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

$$t = -1,544$$

untuk menguji hipotesis ini kriteria yang digunakan adalah uji t dimana penetapan signifikan dengan  $df = n - k - 2 = 3$ , sig 0,05, maka dapat diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 3,182.

Karena  $t_{hitung} -1,544 < t_{tabel} 3,182$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi murni tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

**3. Pengaruh Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni (Partisipasi Pendidikan) terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Tabel 3  
Data Analisis Regresi Linier Berganda

Tahun (n)	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y	X <sub>1</sub> <sup>2</sup>	X <sub>2</sub> <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	X <sub>1</sub> Y	X <sub>2</sub> Y	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>
2009	88,24	72,17	3,62	7786,298	5208,509	13,1044	319,429	261,255	6368,281
2010	88,34	72,37	3,48	7803,956	5237,417	12,1104	307,423	251,848	6393,166
2011	87,58	69,94	3,75	7670,256	4891,604	14,0625	328,425	262,275	6125,345
2012	89,43	71,68	3,69	7997,725	5138,022	13,6161	329,997	264,499	6410,342
2013	87,66	75,64	3,55	7684,276	5721,410	12,6025	311,193	268,522	6630,602
<b>TOTAL</b>	<b>441,25</b>	<b>361,8</b>	<b>18,09</b>	<b>38942,51</b>	<b>26196,962</b>	<b>65,4959</b>	<b>1596,47</b>	<b>1308,4</b>	<b>31927,74</b>

Persamaan regresi linier berganda:  
 $Y = 1,431 - 0,371 X_1 - 0,00003001 X_2$   
 Koefisien korelasi ganda sebagai berikut:

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

= 0,603 (Kuat)

Berdasarkan Tabel simultan antara angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni terhadap persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa X<sub>1</sub> X<sub>2</sub> dan Y adalah sebesar r = 0,603. Jika diinterpretasikan terhadap tabel koefisien korelasi (Tabel), berarti hubungan antara angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni terhadap persentase penduduk miskin bersifat positif dan kuat dengan inteprestasi interval **0,60 – 0,799**.

Koefisien Determinasi Ganda:

$$R^2 = (r_{Y.12})^2 \times 100\%$$

$$= (0,603)^2 \times 100\%$$

$$= 0,364 \times 100\%$$

$$= 36,4\%$$

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi ganda antara angka partisipasi kasar (X<sub>1</sub>) dan angka partisipasi murni (X<sub>2</sub>) memberikan kontribusi terhadap persentase penduduk miskin (Y) sebesar 36,4% sedangkan sisanya 63,6% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi persentase penduduk miskin yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk menguji keberartian koefisien korelasi R<sub>Y12</sub> dilakukan dengan uji F sebagai berikut :

$$F_h = \frac{r^2 / K}{(1 - R^2) / (N - K - 1)}$$

$$= 0,572$$

Untuk menguji hipotesis ini kriteria yang digunakan adalah kriteria uji F dimana penetapan signifikansi dengan dF = n – k –

1; 5 – 2 – 1 = 2, sig 0.05, maka diperoleh nilai dari F<sub>tabel</sub> sebesar 9,55. Dan diketahui nilai perolehan F<sub>hitung</sub> sebesar 0,572. Karena F<sub>hitung</sub> 0,572 < dari F<sub>tabel</sub> 9,55 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak sehingga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni tidak berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian ternyata hipotesis yang diajukan dapat diterima. Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa : Pertama Tidak terdapat pengaruh signifikan Angka Partisipasi Kasar terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009-2013.

Kedua Tidak terdapat pengaruh signifikan Angka Partisipasi Murni terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009-2013.

Ketiga Tidak terdapat pengaruh signifikan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni terhadap persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2009-2013.

**SARAN**

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh maka dapat diajukan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan, saran tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama Hasil tersebut dikarenakan berdasarkan teori menyatakan bahwa partisipasi pendidikan dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan bukan sebaliknya, seperti pernyataan opini publik yang patut dibenarkan adalah bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang, termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya.

Kedua Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persentase penduduk miskin seperti angkatan kerja, pendapatan perkapita, dll.



Ketiga Pengambilan data ada baiknya lebih diperinci lagi khususnya untuk persentase penduduk miskin berdasarkan tingkat pendidikan agar mempermudah dalam mengelola data.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia. 2007. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Indonesia: Bank Dunia.

Ife, Jim. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Saifudin. 2009. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sugandy, Acadan Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan : Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: Alfabeta.

Tim Redaksi *Longman Advanced American Dictionary*. 2007. *Longman: Advanced American Dictionary*. England: Pearson Education Limited.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**.

UN.2011. *The Millennium Development Goals Report*. New York.

Wahid, A. 2008. **Pendidikan versus Kemiskinan, 2**.

<http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>